

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta resiko ke depan di Kota Mataram selama triwulan I tahun 2021 sebagai berikut; Secara umum inflasi Kota Mataram pada triwulan I tahun 2021 masih terkendali. Pada bulan Januari 2021 Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,86 persen. Lebih tinggi dari inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,69 persen (month to month/mtm) dan inflasi nasional sebesar 0,26 persen (mtm). Pada bulan Februari 2021 Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,34 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,72. Inflasi Kota Mataram lebih tinggi dari NTB (inflasi 0,24 persen) dan nasional (inflasi 0,10 persen). Pada bulan Maret 2021, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,34 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,8. Inflasi Kota Mataram lebih tinggi dari NTB (inflasi 0,31 persen) dan nasional (inflasi 0,08 persen). Hal ini sebagai dampak kumulatif terhadap tingginya inflasi pada bulan Januari 2021 (0,86 persen). Sedangkan pada triwulan I (Januari, Februari dan Maret) dari sebelas kelompok pengeluaran, delapan kelompok mengalami inflasi, dua kelompok mengalami deflasi, dan satu kelompok tidak mengalami perubahan. Di triwulan I tahun 2021 Inflasi tertinggi terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, pada bulan Januari sebesar 1,93 persen, bulan Februari sebesar 1,10 persen dan pada bulan Maret 2021 sebesar 0,70 persen. Terdapat beberapa komoditas tertinggi penyumbang inflasi dan deflasi yang tercatat di triwulan I. Beberapa komoditas yang tercatat memberikan andil atau sumbangan inflasi terbesar yaitu cabai rawit, tahu mentah, angkutan udara, tongkol diawetkan, ikan kembung, ikan tongkol dan tarif air minum PAM. Dan beberapa komoditas yang mengalami deflasi terbesar yaitu daging ayam ras, telepon seluler, tongkol diawetkan, tomat, kangkung, emas perhiasan, beras dan daging ayam ras. Akibat curah hujan yang tinggi serta angin kencang mengakibatkan terganggunya arus distribusi dan supply kebutuhan makanan di Kota Mataram sehingga menyebabkan kenaikan harga. Hasil dari pantauan ke pasar tradisional, perkembangan harga cabai pada pertengahan Maret 2021 semakin mengalami lonjakan, terpantau harga cabai di pasar induk Mandalika terpantau dengan kisaran Rp. 130.000,- per kg, dan pada pasar panatauan lainnya kenaikan haega cabai bervariasi, mulai dari harga Rp. 135.000,-sampai harga tertinggi Rp.165.000,-. Sedangkan di komoditi lainnya seperti harga kedelai juga mengalami kenaikan akibat harga dari eksportir mengalami kenaikan. Untuk harga kedelai import sangat signifikan, dari harga awal di bulan Desember 2020 sekitar Rp.7.000,- per kg di bulan Januari 2021 menjadi Rp. 9.100,- sampai Rp.9.150,- per kg. tentunya ini berdampak terhadap harga tahu tempe dikarenakan bahan bakunya dari kedelai. Pada hasil tangkapan nelayan seperti ikan kembung dan ikan tongkol juga mengalami kenaikan harga. Pendapatan nelayan berkurang karena terkendala cuaca, nelayan tidak bisa melaut, menyebabkan harga tangkapan melonjak. Cold storage sebagai tempat penyimpanan hasil tangkapan nelayan milik pemerintah saat ini sedang tidak berfungsi, diperlukan revitalisasi fungsi cold storage milik pemerintah untuk menampung hasil tangkapan nelayan dalam mengantisipasi cuaca buruk yang mempengaruhi hasil tangkapan. Resiko perkembangan inflasi Kota Mataram selanjutnya dan akibat curah hujan yang tinggi serta angin kencang mengakibatkan terganggunya arus distribusi dan supply kebutuhan makanan di Kota Mataram berdampak ke inflasi yang tinggi. Namun pada triwulan ke II tahun 2021 diperkirakan harga-harga sudah mulai terkendali karena faktor cuaca yang sudah mulai berubah. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkrit dalam kondisi saat ini, misalnya dengan mendatangkan stok barang yang mengalami kenaikan harga sehingga diharapkan harga barang menjadi stabil.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kota Mataram triwulan I tahun 2021 masih menghadapi permasalahan yang klasik dan penyebab lainnya, yaitu; a. Perekonomian Kota Mataram tidak bertumpu pada sektor agraria, namun lebih ditopang oleh sector perdagangan dan jasa. Pengaruh kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Mataram setiap tahun mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, pertokoan, dan lainnya yang peningkatannya begitu masif di Kota Mataram. Sehingga menyebabkan produktifitas sektor pertanian ini tidak bisa diandalkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Kondisi ini tentu saja akan menyebabkan sering terjadinya turbulensi terhadap volatile food yang akan memicu terjadinya inflasi di Kota Mataram. b. Adanya kenaikan harga beberapa komoditas di triwulan I tahun 2021 yang memicu kenaikan inflasi antara lain; harga cabai dan kedelai, dikarenakan ada penurunan jumlah hasil tanam cabai (gagal panen) dan harga kedelai juga mengalami kenaikan akibat harga dari eksportir mengalami kenaikan, disamping itu adanya indikasi pengepul yang mengumpulkan barang, karena trend peningkatan harga terjadi di awal tahun. Adanya kenaikan harga juga di beberapa komoditi yaitu pada jenis tangkapan ikan laut, dikarenakan hujan dan gelombang tinggi menyebabkan pendapatan nelayan berkurang karena terkendala cuaca, dan menyebabkan harga hasil tangkapan nelayan menjadi tinggi. Terjadinya lonjakan harga cabai akibat petani gagal panen karena kondisi cuaca yang buruk dan disebabkan karena adanya virus yang menyerang tanaman cabai akibat curah hujan yang tinggi dan penyebab lainnya karena adanya pengiriman cabai keluar daerah walaupun dalam jumlah sedikit. Diperkirakan stok dan harga cabai pada bulan April (bulan Ramadhan) tahun ini mengkhawatirkan disebabkan karena gagal panen. c. Perkembangan harga kebutuhan masyarakat di Kota Mataram selama triwulan I tahun 2021, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhinya yakni disebabkan situasi menjelang bulan Ramadhan dan dikarenakan curah hujan tinggi yang disertai angin kencang sehingga menyebabkan arus distribusi supply dan demand di Kota Mataram mengalami perubahan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Mataram selama triwulan I tahun 2021 antara lain; a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian rutin melakukan pemantauan harga-harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional, dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga beberapa komoditas. b. Telah dilakukan koordinasi antara tim pengendalian inflasi daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan (Polres Mataram) dengan Hiswana Migas terkait data penyaluran gas elpiji 3 kg bersubsidi. c. Koordinasi antara Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dengan Dinas Perdagangan Kota Mataram dalam pelaksanaan bazar murah, dalam rangka stabilisasi harga beberapa komoditi dan kebutuhan pokok bagi masyarakat. d. Pelaksanaan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram, pada tanggal 01 Maret 2021, dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan pokok. Pada kesempatan tersebut dari OPD terkait dan dari lintas sektoral memaparkan tentang kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, penyampaian informasi tentang keadaan cuaca serta penyampaian perkembangan inflasi Kota Mataram: □ Pembahasan 1) Perkembangan laju inflasi Kota Mataram di awal tahun 2021 2) Penyebab kenaikan harga pada kelompok komoditas pangan; cabai, kedelai dan ikan tongkol 3) Kelangkaan barang penting pada gas elpiji 3 kg □ Hasil 1) Pada bulan Januari 2021 Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,86 persen. Lebih tinggi dari inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,69 persen (month to month/mtm) dan inflasi nasional sebesar 0,26

persen (mtm). Pada bulan Februari 2021 Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,34 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,72. Inflasi Kota Mataram lebih tinggi dari NTB (inflasi 0,24 persen) dan nasional (inflasi 0,10 persen) 2) Adanya kenaikan harga beberapa komoditas di awal tahun 2021 yang memicu kenaikan inflasi antara lain; harga cabai dan kedelai, dikarenakan ada penurunan jumlah hasil tanam cabai (gagal panen) disamping itu adanya indikasi pengepul yang mengumpulkan barang, dan harga kedelai juga mengalami kenaikan akibat harga dari eksportir mengalami kenaikan., karena trend peningkatan harga terjadi di awal tahun. Adanya kenaikan harga juga di beberapa komoditi yaitu pada jenis tangkapan ikan laut, dikarenakan hujan dan gelombang tinggi menyebabkan pendapatan nelayan berkurang karena terkendala cuaca, dan menyebabkan harga hasil tangkapan nelayan menjadi tinggi. 3) Untuk harga kedelai import sangat signifikan dari harga awal di bulan Desember 2020 sekitar Rp.7.000,- per kg di bulan Januari 2021 menjadi Rp. 9.100,- sampai Rp.9.150,- per kg. Dan di di awal bulan Februari mengalami kenaikan menjadi Rp.9.800,- sampai Rp.10.000,- per kg, tentunya ini berdampak terhadap harga tahu tempe dikarenakan bahan bakunya dari kedelai. Telah dilakukan survei ke 4 distributor kedelai, terdapat stok kedelai 200 sampai 250 ton, namun harga kedelai masih tinggi. 4) Pada tahun 2021 ada sedikit anomaly atau kekhawatiran pada masyarakat di 2 bulan awal tahun, dikarenakan sering terjadi inflasi yg cukup tinggi. Inflasi bulan Januari tinggi dikarenakan faktor alam (hujan, badai dll) dan berpengaruh terhadap distribusi barang. 5) Pada komoditi lainnya di gas elpiji 3 kg diperlukan penertiban. Ada 9 agen gas elpiji yang menyediakan gas elpiji 3 kg (koordinasi dengan Hiswana migas yang menaungi para agen gas elpiji). 6) Tim pengendalian inflasi untuk mengambil langkah-langkah yang tepat terkait kenaikan harga dan kelangkaan barang. 7) Koordinasi agar lebih diintegrasikan dengan stakeholders lain supaya berkesinambungan. e. TPID Kota Mataram menghadiri zoom meeting/secara virtual kegiatan sosialisasi kriteria evaluasi kinerja TPID tahun 2020 (Award 2021). Pada kesempatan tersebut peserta mendengarkan sambutan dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Kepala Sekretariat TPIP, dan pemaparan tentang panduan sosialisasi kinerja TPID Tahun 2020 (Award tahun 2021), antara lain: • Alur evaluasi kinerja TPID tahun 2020 dalam 6 (enam) tahap dari pengiriman surat evaluasi kinerja TPID, pengumpulan formulir peserta, kemudian penilaian dari 3 aspek yang dinilai, hasil akhir penilaian, keputusan pemenang sampai pengumuman pemenang TPID award 2021. • Tata cara penyampaian dokumen evaluasi kinerja TPID tahun 2020 • Kategori TPID award 2021 berdasarkan evaluasi kinerja TPID tahun 2020, yang terbagi menjadi; Kategori TPID Provinsi Terbaik untuk kawasan Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara: Kategori TPID Kabupaten/Kota Terbaik untuk kawasan Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara: dan Kategori TPID Kabupaten/Kota Non-IHK Berprestasi untuk kawasan Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Hasil yang didapat dari zoom meeting/Sosialisasi Kriteria Evaluasi Kinerja TPID Tahun 2020 (Award 2021), TPID Award memberikan motivasi dan apresiasi kepada daerah yang berhasil dalam mengendalikan inflasi dan memacu daerah lain untuk meraih prestasi yang sama. Kategori TPID terbaik dan berprestasi diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID dan menjadi sampel penghitungan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) maupun yang Non-Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Badan Pusat Statistik. Penilaian kinerja TPID terdiri dari 3 aspek yaitu; proses, output dan outcome kegiatan pengendalian inflasi yang diukur dengan tingkat inflasi dan fluktuasinya. f. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram menghadiri Rapat Koordinasi TPID Nusa Tenggara Barat bertempat di kantor BI Perwakilan Provinsi NTB pada tanggal 25 maret 2021. Dalam rangka stabilisasi harga bahan kebutuhan masyarakat terutama harga cabai yang mengalami kenaikan dan bahan pokok beras di Nusa Tenggara Barat yang mengalami surplus karena menghadapi panen raya. Diperlukan sinergitas antar instansi terkait dalam upaya-upaya

pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas harga dan peningkatan daya beli masyarakat.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Mataram selama triwulan I tahun 2021 sebagai berikut; □ Pengawasan/pemantauan terhadap kenaikan harga pangan dan ketersediaan pasokan pangan diakibatkan curah hujan yang tinggi disertai dengan angin kencang, pada kenaikan harga kebutuhan masyarakat terutama harga cabai, kedelai dan hasil tangkapan ikan laut. □ Masih kurangnya koordinasi yang intensif dan bersinergi dengan instansi terkait dan lintas sector dalam mengimplementasikan 4K (keterjangkauan harga pangan, ketersediaan stok, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif). □ Dibutuhkan biaya operasional cold storage yang cukup, dibutuhkan para nelayan sebagai penyimpanan hasil tangkapan nelayan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Mataram selama triwulan I tahun 2021 sebagai berikut; □ Mengoptimalkan pengawasan/pemantauan terhadap kenaikan harga pangan dan ketersediaan pasokan pangan ditengah curah hujan yang tinggi disertai dengan angin kencang yang terjadi saat ini. Dan pemantauan dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan stok akan kebutuhan masyarakat terutama harga cabai, kedelai dan hasil tangkapan ikan laut. □ Peningkatan koordinasi yang intensif dan bersinergi dengan instansi terkait dan lintas sector maupun dengan TPID Provinsi NTB dalam mengimplementasikan 4K; keterjangkauan harga, ketersediaan stok, kelancaran distribusi dan khususnya dalam komunikasi yang efektif. □ Untuk dilaksanakannya kegiatan operasi pasar/ pasar murah terhadap beberapa bahan pokok komoditas yang rentan mengalami kenaikan seperti cabai, ikan laut, telur dan lain-lain yang merupakan upaya melakukan monitoring perkembangan harga. □ Dilakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait maupun lintas sector serta daerah penghasil serta peningkatan kerjasama dengan daerah/wilayah penghasil komoditas untuk menjamin ketersediaan stok. Berkaitan dengan upaya untuk menjaga ketersediaan stok komoditas pertanian, pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan melalui Satgas Pangan untuk berkoordinasi serta mendapatkan informasi dari para pengepul terkait sejauhmana ketersediaan barang tersebut dan membuat kesepakatan terkait upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. □ Adanya penambahan biaya operasional cold storage sebagai penyimpanan hasil tangkapan nelayan. Diperlukan revitalisasi fungsi cold storage milik pemerintah untuk menampung hasil tangkapan nelayan dalam mengantisipasi cuaca buruk yang mempengaruhi hasil tangkapan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BMKG.